

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
3																					
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																				
3	28																		126,290,000,000	137,500,000,000	
3	28	01																	56,620,000,000	62,282,000,000	
3	28	01	1.01																1,670,000,000	1,837,000,000	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dokumen perencanaan perangkat daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan) Dokumen Renstra dan Renja Dishut yang disusun	Meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	9 Dokumen 2 Dokumen	85 %		650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen		715,000,000	
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Dokumen evaluasi kinerja triwulan Dokumen evaluasi perangkat daerah LAKIP, LPPD, LKPI, Laporan Tahunan)	Meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Dokumen 4 Dokumen	85 %		1,020,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen		1,122,000,000	
3	28	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													42,879,000,000			47,166,900,000
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Gaji dan tunjangan ASN Dishut yang dibayarkan dalam 1 tahun	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	409 Orang	12 Bulan		40,837,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen		44,920,700,000	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengelola Sistem Informasi, Petugas PPHPK)	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	12 Bulan		1,441,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen		1,585,100,000	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Laporan keuangan akhir tahun	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	12 Bulan		260,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen		286,000,000	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Laporan keuangan bulanan dan semesteran	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	13 Laporan	12 Bulan		341,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen		375,100,000	
3	28	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>													621,000,000			683,100,000
3	28	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Gedung Honorarium pengelola asset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian asset Kendaraan dinas operasional	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Unit 12 Bulan 12 Unit	12 Bulan		621,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen		683,100,000	
3	28	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>													1,938,000,000			2,131,800,000
3	28	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	500 Orang	12 Bulan		938,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen		1,031,800,000	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Aparatur Sipil Negara Dishut yang mangikuti BIMTEK	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	450 Orang	12 Bulan		1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen		1,100,000,000	
3	28	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													2,460,000,000			2,706,000,000
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	12 Bulan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen		220,000,000	
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	12 Bulan		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen		550,000,000	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Alat tulis kantor yang disediakan Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen		550,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3	28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	12 Bulan	260,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	286,000,000
3	28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Jenis	12 Bulan	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	275,000,000
3	28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Bulan	12 Bulan	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	825,000,000
<b>3</b>	<b>28 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>1,000,000,000</b>					<b>1,100,000,000</b>
3	28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Pengadaan mebeleur yang diadakan	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 Jenis	12 Bulan	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	1,100,000,000
<b>3</b>	<b>28 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>3,743,000,000</b>					<b>4,117,300,000</b>
3	28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah surat yang didistribusikan	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3600 Surat	12 Bulan	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	132,000,000
3	28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Air Internet Listrik Telepon	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	14508 Meter Kubik 120 mbps 230400 Kwh 16 Rekening Telepon	12 Bulan	1,258,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	1,383,800,000
3	28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Honor PTT Jasa kebersihan kantor Jasa kesehatan jasmani (senam mingguan) Jasa kesehatan rohani (wirid mingguan, program Ramadhan) Jasa pengamanan kantor Jasa sopir kantor	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	13 Bulan 13 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 13 Bulan 13 Bulan	12 Bulan	2,365,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	2,601,500,000
<b>3</b>	<b>28 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>2,309,000,000</b>					<b>2,539,900,000</b>
3	28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jasa balik nama kendaraan Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas / operasional Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	6 Unit 53 Unit 53 Unit	12 Bulan	841,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	925,100,000
3	28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Gedung kantor yang dipelihara Rumah dinas/mess yang dipelihara	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Unit 5 Unit	12 Bulan	1,085,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	1,193,500,000
3	28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Peralatan gedung kantor yang dipelihara Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	287 Unit 12 Bulan	12 Bulan	383,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	421,300,000
<b>3</b>	<b>28 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>								<b>36,535,000,000</b>					<b>39,924,500,000</b>
<b>3</b>	<b>28 03 1.01</b>	<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>								<b>4,150,000,000</b>					<b>4,565,000,000</b>
3	28 03 1.01 01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	Jumlah dokumen rencana bisnis (desain tapak) yang disusun	Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,41 indeks	20 Dokumen	10 KPH	1,900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	2,090,000,000
3	28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	Panjang penataan blok/ pemeliharaan batas pada wilayah KPH yang terlaksana	Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,41 indeks	360 Km	10 KPH	1,250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	1,375,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Indeks Tutupan Hutan	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH yang tersedia dan terpelihara	Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		61,41 indeks	10 KPH	10 KPH	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	1,100,000,000
<b>3</b>	<b>28</b>	<b>03</b>	<b>1.02</b>		<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>							<b>1,000,000,000</b>					<b>1,100,000,000</b>
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek UPTD KPH yang tersusun	Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,41 indeks	11 Dokumen 11 Dokumen	10 KPH	1,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	1,100,000,000
<b>3</b>	<b>28</b>	<b>03</b>	<b>1.03</b>		<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>							<b>4,950,000,000</b>					<b>5,445,000,000</b>
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Produksi yang tersedia	Meningkatnya kepatuhan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan atau kerjasama pemanfaatan hutan sesuai aturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	10 Dokumen	80 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	550,000,000
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Lindung yang tersedia	Meningkatnya kepatuhan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan atau kerjasama pemanfaatan hutan sesuai aturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	10 Dokumen	80 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	550,000,000
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan produksi	Meningkatnya kepatuhan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan atau kerjasama pemanfaatan hutan sesuai aturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	27 Unit 10 KPH	80 %	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	715,000,000
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan lindung	Meningkatnya kepatuhan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan atau kerjasama pemanfaatan hutan sesuai aturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	20 Unit 10 KPH	80 %	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	605,000,000
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah unit KPHP yang dinilai	Meningkatnya kepatuhan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan atau kerjasama pemanfaatan hutan sesuai aturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	3 KPH	80 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	55,000,000
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah unit KPHL yang dinilai	Meningkatnya kepatuhan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan atau kerjasama pemanfaatan hutan sesuai aturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	7 KPH	80 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	110,000,000
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan hutan	Meningkatnya kepatuhan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan atau kerjasama pemanfaatan hutan sesuai aturan		20 unit	10 Kelompok	80 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	220,000,000
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH	Meningkatnya kepatuhan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan atau kerjasama pemanfaatan hutan sesuai aturan		20 unit	10 Komoditi/Produk 10 Unit	80 %	2,400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	2,640,000,000
<b>3</b>	<b>28</b>	<b>03</b>	<b>1.04</b>		<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>							<b>13,585,000,000</b>					<b>14,679,500,000</b>
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Indeks Tutupan Hutan	Jumlah dokumen rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersusun	Menurunnya luas lahan kritis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,41 indeks	1 Dokumen	0.04 %	95,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	104,500,000
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Indeks Tutupan Hutan	Luas Hutan Rakyat yang terbangun	Menurunnya luas lahan kritis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,41 indeks	300 Ha	0.04 %	4,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	4,950,000,000
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	Jumlah bangunan sipil teknis kehutanan	Menurunnya luas lahan kritis		61,41 indeks	100 Unit	0.04 %	3,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	3,300,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Indeks Tutupan Hutan	Jumlah Arboretum untuk pelestarian Sumber Daya Genetik Jumlah Kebun Bibit Rakyat yang terbangun Jumlah unit persemaian	Menurunnya luas lahan kritis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,41 indeks	2 Unit 50 Unit 1 Unit	0,04 %	5,490,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	5,775,000,000
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Indeks Tutupan Hutan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5 Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan RHL	Menurunnya luas lahan kritis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,41 indeks	1 Dokumen 10 Dokumen	0,04 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	550,000,000
<b>3</b>	<b>28</b>	<b>03</b>	<b>1.05</b>		<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>6,250,000,000</b>				<b>6,875,000,000</b>		
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	Jumlah kasus Tindak Pidana Kehutanan yang tertangani Jumlah Patroli Pengamanan Hutan Jumlah Peta Rawan Kerusakan Hutan Jumlah satgas LMPHBN	Menurunnya kerusakan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,41 indeks	5 Kasus 160 Kali 1 Peta 450 Orang	15 %	3,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	3,850,000,000
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Indeks Tutupan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Menurunnya kerusakan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,41 indeks	20 Kali	15 %	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	440,000,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	Jumlah masyarakat peduli api yang terfasilitasi Jumlah Patroli, koordinasi, sinkronisasi Pencegahan Dan penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan pada Wilayah Kelola KPH	Menurunnya kerusakan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,41 indeks	150 Orang 150 Kali	15 %	2,350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	2,585,000,000
<b>3</b>	<b>28</b>	<b>03</b>	<b>1.06</b>		<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>						<b>6,100,000,000</b>				<b>6,710,000,000</b>		
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Indeks Tutupan Hutan	Luas budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif	Meningkatnya pengolahan hasil hutan bukan kayu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,41 indeks	300 Ha	85 %	6,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	6,600,000,000
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Indeks Tutupan Hutan	Jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang terkendali	Meningkatnya pengolahan hasil hutan bukan kayu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,41 indeks	20 Unit	85 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	110,000,000
<b>3</b>	<b>28</b>	<b>03</b>	<b>1.07</b>		<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>						<b>100,000,000</b>				<b>110,000,000</b>		
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Indeks Tutupan Hutan	Jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun yang terkendali	Meningkatnya pengolahan hasil hutan kayu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,41 indeks	40 Unit	85 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Tutupan Hutan	61,41 indeks	110,000,000
<b>3</b>	<b>28</b>	<b>03</b>	<b>1.09</b>		<b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>						<b>400,000,000</b>				<b>440,000,000</b>		
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit	Menurunnya luas lahan kritis di luar kawasan hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	10 Unit	0,04 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	165,000,000
3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah sertifikasi sumber benih	Menurunnya luas lahan kritis di luar kawasan hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	2 Sertifikat	0,04 %	50,000,000		Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	55,000,000
3	28	03	1.09	03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah sertifikasi mutu benih	Menurunnya luas lahan kritis di luar kawasan hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 unit	10 Sertifikat	0,04 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	55,000,000
3	28	03	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah sertifikasi mutu bibit	Menurunnya luas lahan kritis di luar kawasan hutan		20 unit	20 Sertifikat	0,04 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	55,000,000
3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	Menurunnya luas lahan kritis di luar kawasan hutan		20 unit	7 Unit	0,04 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	20 unit	110,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN  
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	28 04				<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>								<b>1,000,000,000</b>		<b>1,100,000,000</b>	
3	28 04	1.03			<b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>								<b>1,000,000,000</b>		<b>1,100,000,000</b>	
3	28 04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Ekosistem	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada wilayah KPH		100 persen	10 Kelompok	10 KPH	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi	100 persen	440,000,000
3	28 04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi	Jumlah Kawasan Konservasi Ekosistem yang difasilitasi	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada wilayah KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 Lokasi	10 KPH	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi	100 persen	660,000,000
3	28 05				<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>								<b>29,935,000,000</b>		<b>31,773,500,000</b>	
3	28 05	1.01			<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>								<b>29,935,000,000</b>		<b>31,773,500,000</b>	
3	28 05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan meningkat kompetensinya Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	Meningkatnya kelompok usaha pehutanan sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000 hektar	250 Orang 10 Unit 10 Unit	10 KH	2,885,000,000		Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	2,953,500,000
3	28 05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	Meningkatnya kelompok usaha pehutanan sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000 hektar	100 Kelompk	10 KH	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	550,000,000
3	28 05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Jumlah anggota Perhutanan Sosial yang mengikuti forum Jumlah fasilitasi kewirausahaan Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi Jumlah Stup Lebah Madu Jumlah Unit Ekonomi Produktif dan Sarpras Ekowisata yang difasilitasi Jumlah usulan Perhutanan Sosial	Meningkatnya kelompok usaha pehutanan sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000 hektar	300 Orang 100 Kali 50 Kelompok 3000 Stup 75 Unit 30 Kelompok	10 KH	26,550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	50.000 hektar	28,270,000,000
3	28 06				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>								<b>2,200,000,000</b>		<b>2,420,000,000</b>	
3	28 06	1.01			<b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>								<b>2,200,000,000</b>		<b>2,420,000,000</b>	
3	28 06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	Jumlah kinerja pengelolaan DAS yang terevaluasi	Terlaksananya Pengelolaan DAS di wilayah kelola KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Daerah Aliran Sungai	3 DAS	10 KPH	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	495,000,000
3	28 06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	Jumlah Petak Ukur Permanen yang terbangun dan terre-enumerasi Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan yang tersusun	Terlaksananya Pengelolaan DAS di wilayah kelola KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Daerah Aliran Sungai	30 Petak 10 KPH	10 KPH	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	880,000,000
3	28 06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	Jumlah Kelompok masyarakat yang diberdayakan	Terlaksananya Pengelolaan DAS di wilayah kelola KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Daerah Aliran Sungai	4 Kelompok	10 KPH	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	605,000,000
3	28 06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang difasilitasi	Jumlah lembaga pengelolaan DAS	Terlaksananya Pengelolaan DAS di wilayah kelola KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Daerah Aliran Sungai	2 Unit	10 KPH	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah DAS yang difasilitasi	3 Daerah Aliran Sungai	440,000,000
<b>TOTAL</b>														<b>126,290,000,000</b>		<b>137,500,000,000</b>